

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI
PENDEKATAN *COMMUNITY BASED TOURISM*
(Studi Pada Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto)**

Yuli Ardianti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

yuli.18070@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

debyeprilianto@unesa.aac.id

Abstrak

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) merupakan konsep baru dalam mengelola pariwisata, konsep ini sangat mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka namun tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip dari konsep *community based tourism* dalam pengembangan desa wisata di Desa Tanjung. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Tanjung, satu anggota BPD, Ketua BUMDes Desa Tanjung, satu anggota LPM Desa Tanjung, satu anggota Karang Taruna Desa Tanjung, dan 2 masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengukuran penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Suansri dalam (Juardi et al, 2020), antara lain: 1) Prinsip keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata, kegiatan dari pengelola pariwisata dan masyarakat desa meliputi, gotong royong kerja bakti, menjaga loket wisata, dan pelatihan-pelatihan untuk pengelola wisata; 2) Prinsip menjaga lingkungan hidup meliputi, kegiatan penanaman pohon, membersihkan area wisata yang dilakukan setiap bulan sekali; 3) Prinsip kelestarian budaya, Budaya yang dimiliki desa ini adalah kirab budaya sewu takir dewi sekar tanjung dan gamelan; dan 4) Prinsip pemerataan pendapatan, pemerintah dan lembaga Desa Tanjung memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan salah satu wisata lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pada kelompok pemuda masih sangat rendah. Partisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar, juga belum maksimal. Dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata perlu meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada kelompok pemuda sebagai generasi penerus, memperbaiki fasilitas, dan menjaga hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, *community based tourism*, desa wisata.

Abstract

Community based tourism (CBT) is a new concept in managing tourism, the concept highly emphasizes the active participation of society in order to provide for their welfare but still preserve the quality of the environment, and protect its social and cultural life. This study aims to describe the implementation of the principles of the concept community based tourism in the development of tourist villages in Tanjung village. The research subjects is village chief of Tanjung village, one member of BPD, head of BUMDes Tanjung village, one member of LPM Tanjung village, one member of youth organization, and 2 people. The data collection techniques used in the study are observation, interviews, and documentation. This study used indicators presented by suansri in (Juardi et al, 2020), including: 1) Involve community members from the start in every aspect, activities of tourism administrators and village communities include, community service, guarding tourist counters, and training for field trips; 2) Ensure environmental sustainability including, tree planting, cleaning the tourist areas once a month; 3) Preserve the unique character and culture of the local area, The culture of this village is Kirab Budaya Sewu Takir Dewi Sekar Tanjung and Gamelan; and 4) Contribute a fixed percentage of income to community projects, village governments and institutions utilize the village's potential to be one of the local tourism aimed at boosting the village's native income. Studies show that participation in youth groups is still very low. Participation in the principles of environmental sustainability has not been maximized. Until now, the government and society of Tanjung village have given much credence to the culture. To support the success of tourism development, will seed to increase community participation primarily in youth groups as succeeding generations, improve the facilities and mintain good relations between the village government and society.

Keywords: public participation, *community based tourism*, tourist village.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk modal dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Masyarakat harus ikut serta terlibat, demi mencapai tujuan dari pembangunan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh sebab itu partisipasi dari masyarakat menjadi syarat penting dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan cenderung memarginalkan masyarakat itu sendiri (Septiani, 2019). Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama yakni antara pemerintah dan masyarakat.

Saat ini pembangunan pariwisata merupakan sektor unggulan bagi Indonesia. Pariwisata telah mengalami pengembangan serta berbagai variasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu pertumbuhan yang terbesar dan tercepat di dunia dalam bidang ekonomi (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2019). Seperti data berikut yang menunjukkan devisa negara di sektor pariwisata, dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan devisa tiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah devisa Sektor Pariwisata Tahun 2016-2018

Wilayah	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$)		
	2016	2017	2018
Indonesia	11.206	13.139	16.426

Sumber: www.bps.go.id

Pengembangan pariwisata juga salah satu faktor penting bagi pembangunan daerah. Dengan dikembangkannya daerah potensial menjadi sebuah wisata tentunya akan mempunyai dampak bagi aspek mulai dari ekonomi hingga sosial. Berbagai objek wisata berupa alam, budaya, tata hidup, dan sebagainya memiliki daya tarik tersendiri dan nilai jual untuk dikunjungi atau diminati oleh wisatawan. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat di antaranya yaitu, 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Septiani, 2019).

Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia hidup dan tinggal di pedesaan. Desa memegang peran penting untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Sebagai Negara yang banyak memiliki potensi sektor

pariwisata, tentunya sangat bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Pariwisata di pedesaan dianggap memiliki kaitan dengan strategi pembangunan yang berpotensi bagi suatu desa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan menjadi daerah wisata.

Desa wisata adalah salah satu alternatif untuk dapat dikembangkan menjadi pariwisata pada era saat ini. Desa wisata memiliki sebuah karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan keunikan yang dimiliki seperti kehidupan sosial, budaya masyarakat setempat maupun secara fisik dari tempat wisata tersebut, Zebua dalam (Sanjaya, 2018). Hal ini menjadi sangat istimewa dalam pengembangan desa wisata dengan menggunakan model pembangunan pariwisata yang mementingkan pada aspek ekologis, sosial, dan pariwisata (Sanjaya, 2018). Modal utama dari pembangunan desa wisata ini bisa dilihat dari kebudayaan, potensi dan keindahan alam yang ada di desa tersebut. Perlu adanya keseimbangan untuk mengembangkan pariwisata alternatif sebagai daya tarik. Selain itu melihat dari potensi yang ada pada desa dan keindahan alam serta keunikan budaya dan tradisi masyarakat lokal (Amerta, 2019).

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, menyebutkan bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, telah ditetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata (Kemenpar, 2011). Ada banyak desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Pulau Jawa sebanyak 599 desa wisata, Pulau Sumatera 573 desa wisata, Pulau Sulawesi sebanyak 269 desa wisata, Pulau Nusa Tenggara sebanyak 221 desa wisata, Pulau Kalimantan 92 desa wisata, Pulau Maluku 61 desa wisata dan Pulau Papua sebanyak 21 desa wisata.

Hingga kini, jumlah desa wisata terbanyak berada di Pulau Jawa dengan total 599 Desa dan tersebar di berbagai provinsi, salah satunya Jawa Timur. Terletak di bagian timur Pulau Jawa dan merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa. Meliputi, pulau Madura, Pulau Bawean dan Pulau Kangean. Provinsi dengan lambang daerah atau maskot berupa flora (tumbuhan) dan fauna (binatang) ini banyak memiliki kearifan lokal. Dewasa ini, objek desa wisata di Jawa Timur semakin dikembangkan guna melestarikan dan mendorong potensi keunikan budaya-budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Provinsi Jawa Timur membentuk organisasi yang dinamakan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) Provinsi Jawa Timur dengan tujuan sebagai wadah bagi pengelola desa wisata serta sarana untuk memperkuat komunikasi dan berbagi informasi. Adanya pembangunan desa wisata ini, mendukung Nawa Bhakti Gubernur Jawa Timur 2019-2024

yakni mendorong terciptanya Desa Mandiri. Di Jawa Timur memiliki 292 desa wisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota (Ruhimat et al, 2020).

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang banyak memiliki objek desa wisata. Sebagai kawasan yang masuk dalam gerbang Kertasusila menjadikannya daerah yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Kabupaten Mojokerto memiliki luas 969.360 km² dengan 18 kecamatan dan 299 desa. Sebagai rujukan wisata sejarah Kerajaan Majapahit, Kabupaten Mojokerto terus mengembangkan potensi wisatanya selain di bidang budaya. Objek pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto antara lain;

Tabel 2. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa	Objek Wisata
Kecamatan Trowulan	Desa Bejjong	Candi Brahu
		Candi Gentong
		Situs Siti Inggil
	Desa Trowulan	Mahaviara Majapahit
		Museum Purbakala
		Candi Minakjinggo
		Situs Kolam Segaran
		Situs Kubur Panjang
		Situs Makam Putri Cempa
	Desa Sentonorejo	Situs Makam Troloyo
		Candi Bajang Ratu
	Desa Temon	Candi Tikus
		Candi Wringinlawang
	Desa Jatipasar	Candi Grinting
	Desa Karangjeruk	Petilasan Hayam Wuruk
	Desa Panggih	Pendopo Agung
	Desa Ngigluk	Pusat Perkulakan Sepatu (PPST)
	Desa Watesumpak	Makan Tumenggung Prawiroso
Kecamatan Bangsal	Desa Sumberwono	Candi Jedong
Kecamatan Ngoro	Desa Wotanmasjedong	Candi Brangkal
	Desa Candiharjo	Candi Genting
	Desa Kutogirang	Candi Genting
Kecamatan	Desa Tanjungan	Waduk

Kemlagi		Tanjungan
Kecamatan Dawarblandong	Desa Cinandang	Waduk Cinandang
	Desa Kupang	Watublorok
Kecamatan Jetis	Desa Mlirip	MKP Brantas
	Desa Perning	Situs Phitecantropus Mojokerto
Kecamatan Mojoanyar	Desa Lengkong	Taman Wisata Rolak Songo
Kecamatan Jatirejo	Desa Lebak Jabung	Petilasan Jogo Panji Laras
		Makam Ki Ageng Jabung
		Petilasan "Gajah Mada" Jabung
Kecamatan Puri	Desa Sambilawang	Toga Dayang Sumbi
	Desa Plososari	Makam Syeh Mahmud
Kecamatan Gondang	Desa Begaganlimo	Selokendit
Kecamatan Gedeg	Desa Beratwetan	Candi Sumur Gantung

Sumber: mojokertokab.go.id

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto banyak memiliki potensi unggul, terutama potensi pada Desa. Hingga saat ini, desa wisata masih menjadi sebuah *trend* baru untuk menjelaskan suatu kawasan wisata berbasis desa yang di perkenalkan kepada pengguna jasa wisata (Prapita, 2018). Selain itu pariwisata desa merupakan potensi unggul yang dapat ditingkatkan untuk mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Tidak hanya menyajikan pemandangan alam yang indah, namun para wisatawan juga dapat berinteraksi secara langsung kepada masyarakat lokal (Ma'ruf et al, 2018). Salah satu yang menjadi objek peneliti adalah Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi. Berdasarkan keputusan Bupati Mojokerto nomor 188.45/hk/416-012/2020 tentang penerima dan besaran pembayaran kekurangan bagi hasil retribusi daerah (alokasi kurang bayar) untuk tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2019 yang dibayarkan tahun anggaran 2020 menyebutkan bahwa telah dilakukan kerja sama bersama antara Bupati Mojokerto dengan Kepala Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto nomor 35 tahun 2015, nomor 96.416.306.14/tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Ekowisata Desa Tanjungan.

Konsep pengembangan desa wisata merujuk pada unsur 3A dalam pariwisata dan keterlibatan masyarakat (*community involvement*) yaitu Aktraksi, Aksesibilitas, dan

Amenitas (Wiyati, 2021). Sedangkan pedoman dari pengembangan wisata ada 2 menurut Wiyati (2021) antara lain 1) Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*), dan 2) Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

Community based tourism merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat yang sadar dan menghargai sumber daya lokal dan mendukung pengembangan pariwisata akan menunjukkan lebih banyak kepedulian pada pariwisata, Shakeela dan Weaver dalam (Lee & Jan, 2019). Menurut Tasci dkk, dalam (Giampiccoli & Saayman 2018) juga menyebutkan, CBT adalah sebuah pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dan dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat, dipimpin dengan tanggung jawab, akses, kepemilikan dan manfaat. Asal-usul dari konsep CBT dapat di telusuri kembali pada pendekatan pengembangan alternatif 1970-an, bentuk strategi pengembangan alternatif dan pengembangan pariwisata CBT ini seperti pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan, Mitchell dan Muckosy dalam (Giampiccoli & Saayman, 2018). Selain itu, *Community Based Tourism* dapat membantu menyadarkan masyarakat lokal terhadap potensi di daerahnya dan para wisatawan lebih menghargai kehidupan pada masyarakat lokal (Febriandhika & Kurniawan, 2019).

Suanri dalam (Juardi et al, 2020) mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan *community based tourism*. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas
- j. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan.

Dari 10 prinsip tersebut dapat disimpulkan ke dalam beberapa prinsip pengelolaan *community based tourism* yaitu:

1. Prinsip keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata.
2. Prinsip menjaga lingkungan hidup.
3. Prinsip kelestarian budaya.
4. Prinsip pemerataan pendapatan.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Poncokusumo et al tahun 2016 menyebutkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) merupakan suatu konsep dalam mengelola pariwisata dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka namun tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Beberapa poin penting pada penelitian ini, antara lain bahwa partisipasi masyarakat selalu dilibatkan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat selalu diundang ke dalam rapat pengelola wisata. Dalam hal pelaksanaan dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola aktivitas wisata. Begitu pun saat tahap evaluasi kehadiran dari anggota maupun masyarakat yang aktif memberikan ide, saran dan masukan demi kebaikan dan keberlanjutan wisata sangat penting, namun tetap menghargai terhadap partisipasi pasif.

Struktur dari unit pengelola Desa Wisata Tanjungan berada di bawah naungan BUMDes Desa Tanjungan. Potensi yang dimiliki desa ini tidak kalah dengan desa lainnya, antara lain: (1) Lahan pertanian, (2) Peternakan, (3) Waduk Tanjungan, (3) Hutan Rakyat, (5) UMKM, (6) Seni Budaya, (7) Makanan Tradisional, (8) Wisata Religi Mbah Jenggot, dan (9) Kolam Pemancingan. Di samping itu, sumber daya alam yang dimiliki Desa ini memiliki luas kurang lebih sekitar 40 hektar yang terdiri dari 19 hektar luas area waduk dan 21 hektar hutan jati milik masyarakat setempat. Saat ini potensi alam tersebut telah dijadikan objek wisata dan diperkenalkan secara luas guna menarik pengunjung. Dalam pengelolaan desa wisata masyarakat diperkenankan untuk turut berpartisipasi.

Komunitas pengelola wisata menyediakan lahan parkir, warung-warung, dan pos penyedia informasi, dimana hal tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam manajemen seluruh tata kelola area wisata. Sehingga, dapat membantu meningkatkan roda perekonomian. Pendapatan yang di hasilkan tentunya mampu untuk mensejahterakan seluruh warganya. Dalam upaya meningkatkan pengunjung, BUMDes Desa Tanjungan berencana bekerja sama dengan warga desa membentuk dan mengadakan Wi-Fi di lokasi wisata agar masyarakat lebih leluasa mencari informasi di media sosial. Penyediaan Wi-Fi di lokasi wisata berharap akan menunjang kemudahan akses wisatawan menjangkau lokasi Desa Wisata Tanjungan, serta memperoleh informasi mengenai Wisata Desa Tanjungan.

Pengelola wisata di berikan pembekalan dan pelatihan dari pusat pemberdayaan dan komunitas perkotaan (PUSDAKOTA) Universitas Surabaya (UBAYA) pada tahun 2018. Di ikuti sebanyak 40 orang terdiri dari anggota kelompok karang taruna, pengelola wisata, pemilik warung-warung, dan beberapa pemerintah desa. Materi yang dibahas seputar cara menyambut pengunjung, pemberian informasi

pada pengunjung dan kuliner. Sebuah desa wisata perlu adanya sistem manajemen yang baik. Jika pengelolaan manajemennya baik maka dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pelayanan yang diberikan ke pengunjung. Pembekalan dan pelatihan ini mendukung dari keberhasilan suatu objek wisata. Salah satu tingkat keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata, yakni dengan ditentukannya partisipasi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat digerakkan dalam pengembangan wisata (Hardianti et al, 2017).

Berbagai upaya di atas dilakukan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa Tanjungan demi mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Akan tetapi, masih dijumpai permasalahan-permasalahan yang timbul. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, dkk tahun 2019 bahwa kesadaran dari masyarakat Desa Tanjungan terhadap pelayanan pariwisata masih rendah, belum adanya strategi menarik wisatawan berkunjung Waduk Tanjungan, kualitas dari manajemen pengelola masih sangat perlu ditingkatkan. Masih belum adanya pemikiran untuk dijadikan wisata berkelanjutan di masa mendatang. Beberapa target yang disusun yang diharapkan membawa dampak dengan membuat strategi penataan lingkungan wisata, media promosi guna pengembangan tata kelola wisata, adanya pendampingan dan pembekalan bagi komunitas pengelola wisata.

Selain itu, berdasarkan observasi singkat di lapangan diperoleh bahwa partisipasi masyarakat Desa Tanjungan dalam mengembangkan desa wisata dilihat dari pendekatan konsep *community based tourism* masih sangat belum maksimal. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengurus utama komunitas pengelola wisata, masyarakat masih kurang aktif dalam hal partisipasi, kurang terlibat dalam kegiatan, kurang diterapkannya pembekalan dan pelatihan tentang pariwisata dan kurangnya pemberian edukasi terhadap pengelolaan sampah. Karena desa wisata ini memiliki prinsip ekowisata yang berwawasan alam dengan mengutamakan aspek sosial, budaya, ekonomi, serta pemberian edukasi, Maka pendekatan *community based tourism* dirasa cocok digunakan sebab konsep ini merupakan sebuah model baru dalam pengelolaan pariwisata dan mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat melalui pendekatan konsep *community based tourism* terhadap pengembangan desa wisata. Supaya bisa menjadikan masyarakat desa yang aktif dan mandiri dalam setiap kegiatan di desa terutama dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan

pelaksanaan prinsip-prinsip dari konsep *community based tourism* dalam pengembangan desa wisata di Desa Tanjungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2017). Lokasi Penelitian ini Terletak di Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini melihat partisipasi masyarakat dari pendekatan konsep *community based tourism*, dengan indikator yang dikemukakan oleh Suansri dalam (Juardi et al, 2020) dan telah disimpulkan ke dalam beberapa prinsip pengelolaan *community based tourism* yaitu:

1. Keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata. Masyarakat dan komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata, melihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.
2. Menjaga lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat desa terhadap lingkungan sekitar lokasi pariwisata, kepedulian terhadap konservasi, pengembangan daya dukung pada lingkungan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.
3. Kelestarian budaya. Adanya budaya pembangunan yang berkembang dengan adanya pengembangan pariwisata seperti penghormatan terhadap budaya lain atau pertukaran budaya.
4. Pemerataan pendapatan. Adanya desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan juga dapat bermanfaat untuk seluruh komunitas baik yang berhubungan langsung dengan pariwisata maupun tidak untuk kebutuhan jangka pendek/kebutuhan praktis dan kebutuhan jangka panjang/kebutuhan strategis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang sedang diselidiki (Anggara, 2015). Observasi dilakukan secara langsung yakni melihat langsung terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh dengan mengamati secara langsung partisipasi masyarakat untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas. Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden (Anggara, 2015). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa untuk mendapatkan informasi langsung bagaimana partisipasi masyarakat Desa dalam mengembangkan Wisata Desa. Dokumentasi yakni untuk mengetahui data yang diperoleh melalui dokumen seperti arsip, rekaman gambar maupun suatu peristiwa yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Subjek dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dipilih

secara langsung informan yang dianggap mengetahui permasalahan. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Tanjung, 1 perwakilan dari anggota BPD, Ketua BUMDes Desa Tanjung, perwakilan anggota LPM Desa Tanjung, 1 anggota Karang Taruna Desa Tanjung, dan 2 masyarakat Desa Tanjung. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Tahapan dalam analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Yusuf, 2017), antara lain (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjung merupakan Desa yang terletak di lereng Gunung Welirang dan Penanggungan. Terdiri dari 3 Dusun, antara lain Dusun Tanjung memiliki 8 RT 4 RW, Dusun Sukomulyo memiliki 4 RT 2 RW, dan Dusun Jeruk memiliki 3 RT 1 RW. Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Konsep Desa Wisata Tanjung adalah (1) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (*vs mass tourism*); (2) Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi) Pola wisata ramah budaya dan adat Desa Tanjung (nilai edukasi dan wisata); (3) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat Desa Tanjung (nilai ekonomi); (4) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).

A. Pengembangan Desa Wisata Tanjung

Pariwisata yang memiliki kesamaan konsep dengan *community based tourism* adalah ekowisata. Bertanggung jawab secara penuh terhadap daerah kaya akan sumber daya alam yang memiliki ciri khas budaya dan sejarah yang terintegrasi ke dalam sistem ekologi.

Desa Wisata Tanjung pada dasarnya hanyalah sebuah waduk yang dibangun dengan tujuan irigasi bagi kebutuhan di sektor pertanian. Saat itu masyarakat kekurangan air untuk mengalir sawah yang menjadi mata pencaharian mereka. Sedangkan hutan jati di sekitar waduk adalah milik masyarakat setempat dan dikelola sendiri oleh masyarakat.

Sebelum menjadi wisata, asal mula terbentuknya yaitu, berawal dari pembangunan waduk pada masa pemerintahan orde baru tahun 1982 melalui anggaran bulanan dari Departemen Kehutanan dengan biaya mencapai Rp.149.000.000. Sehingga, ketika pembangunan waduk tersebut terselesaikan, masyarakat merasa sangat terbantu dan bisa bertani lebih dari sekali dalam setahun, tanpa harus menunggu saat datangnya musim hujan. Pada tanggal 11 April 1983 Waduk Tanjung diresmikan secara simbolik oleh Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijoedarmo pada masa itu, dengan menanam sejumlah pohon secara swadaya.

Menurut hasil dari wawancara di lapangan, pada tahun 1985 masyarakat melihat bahwa terdapat adanya potensi yang ada di Desa setelah dibangunnya waduk. Kemudian di tahun yang sama pemerintah kabupaten melihat dan mengetahui tentang potensi tersebut. Setelah itu, dibuatlah perjanjian MOU antara pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Desa Tanjung. Jika kawasan sekitar waduk di jadikan tempat wisata maka Desa mendapatkan bagian sebanyak 30% dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapat bagian sebanyak 70%. Akan tetapi sampai di tahun 2017 anggaran yang seharusnya untuk pembangunan wisata tidak direalisasikan oleh kabupaten.

Dana penerima dan besaran pembayaran kekurangan bagi hasil retribusi daerah untuk tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2019 yang di bayarkan pada tahun 2020 untuk pembangunan objek wisata Desa Tanjung pada bulan Nopember diperoleh sebesar Rp. 5.853.600,00, kemudian pada bulan Desember memperoleh besar bagian hasil sebesar Rp. 9.384.300,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk pembangunan Desa Wisata Tanjung mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana. Sehingga, objek bangunan seperti jalan dan fasilitas lainnya yang terdapat di area sekitar desa wisata adalah dana yang murni dari penghasilan wisata, dana desa, dan pihak lain. Hal ini ditunjukkan oleh data sebagai berikut;

Tabel 3. Data Pembangunan Kegiatan Program di Desa Wisata

Realisasi Tahun	No.	Proram Anggaran	Pembangunan Prasarana
2016	1.	Dana Desa	Jembatan
2017	2.	Dana Desa	Jalan Trap
	3.	Dana Desa	Pagar Pengaman
2018	4.	Swadaya	Musholla
	5.	Swadaya	Poss Informasi
	6.	Dana Desa	Kolam Renang Anak-anak
2019	7.	Polres Mojokerto	Toilet
	8.	Ubaya	Toilet
2020	9.	Dana Desa	Pemasangan Listrik
	10.	Dana Desa	Pelebaran jembatan
	11.	Ubaya	Kanovi panggung
2021	12.	BUMDes	Water Boom
	13.	Disparpora Kabupaten Mojokerto	Jalan Paving
	14.	BUMDes	Gazebo

Sumber: diolah peneliti, 2022

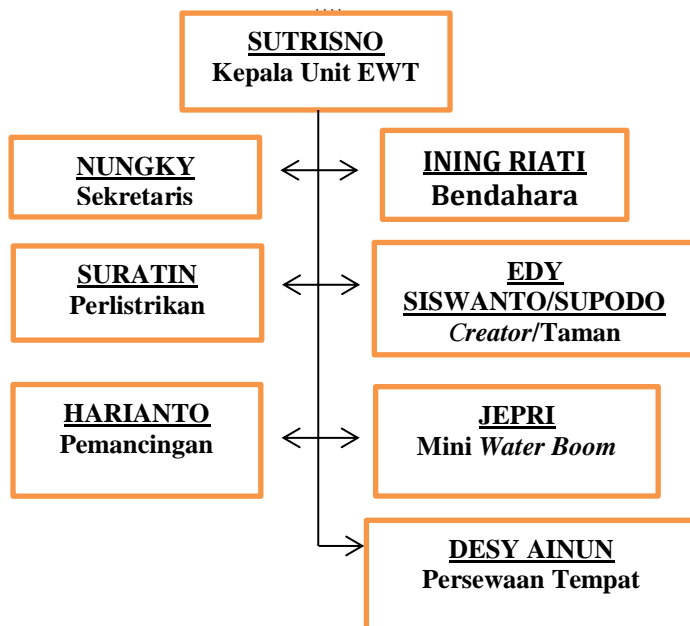
Akibat dari keterlambatan pencairan dana oleh Kabupaten Mojokerto, data di atas menunjukkan total anggaran pembangunan prasarana Desa Wisata Tanjungan per tahun 2016-2021 secara keseluruhan mencapai Rp. 614.120.000. Anggaran terbanyak berasal dari Dana Desa (DD) dan beberapa sumbangsih dari instansi serta swadaya.

B. Analisis Prinsip-Prinsip dalam Pendekatan *Community Based Tourism*

1. Prinsip Keikutsertaan Anggota Komunitas Ke Dalam Setiap Kegiatan Pariwisata

Pada prinsip ini masyarakat dan pemerintah desa sangat berkaitan erat untuk mengembangkan potensi melibatkan komunitas pengelola wisata. Menurut hasil wawancara dulunya ada beberapa komunitas yang terbentuk untuk mengelola desa wisata, yakni Asosiasi Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Saat ini keberadaan dari komunitas-komunitas tersebut telah dialihkan di bawah naungan BUMDes Desa Tanjungan bagian komunitas pengelola wisata, sebab terlalu banyak lembaga atau komunitas yang didirikan menjadi tidak efektif dalam mengelola desa wisata.

Berikut adalah struktur organisasi pengelola wisata Desa Tanjungan;



Gambar 1. Struktur Organisasi Ekowisata Tanjungan

Sumber: BUMDes Desa Tanjungan

Pada tahun 2018 masyarakat Desa Tanjungan diberikan pembekalan dan pelatihan oleh Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan Universitas Surabaya (PUSDAKOTA UBAYA) berupa pelatihan-pelatihan cara menyambut pengunjung wisata dan cara

bagaimana mempersiapkan keperluan apabila ada tamu berkunjung. Manajemen pelatihan tersebut diikuti 40 orang yang terdiri dari komunitas pengelola wisata, pemilik warung-warung, beberapa perwakilan pemerintah desa dan karang taruna. Adanya pelatihan ini membantu mengantisipasi kesiapan jika terjadi lonjakan pengunjung. Juga Dibentuk kelompok *tour guide* untuk menyiapkan segala keperluan dari tamu yang berkunjung.

Menurut hasil observasi di lapangan, kegiatan dari komunitas pengelola desa wisata adalah menjaga di area tiket masuk, pusat informasi wisata, kolam renang dan penyewaan keperluan *outbond*. Komunitas pengelola wisata menyediakan fasilitas area parkir, *jungle tracking*, kamar mandi umum, *outbond*, *Water Boom*/kolam renang anak dan pusat informasi di lokasi wisata. Akan tetapi melihat masyarakat dengan kondisi perorangan dan watak tiap individu berbeda menyebabkan pelatihan yang telah di berikan kurang begitu diterapkan. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan observasi dan kunjungan beberapa kali, bahwa materi-materi yang diberikan saat pembekalan tidak terlihat digunakan pada saat ada pengunjung wisata.



Gambar 2. Fasilitas di Area Lokasi Wisata
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan Wisata Desa Tanjungan sudah cukup baik. Dilihat dari setiap kegiatan yang ada di desa, masyarakat selalu dilibatkan di dalamnya. Setiap satu bulan sekali, rutin dijadwalkan kerja bakti yang bergiliran antar dusun di area lokasi wisata. Dalam setiap kegiatan kerja bakti, koordinator dari tiap dusun membuat daftar hadir supaya mengetahui siapa saja yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Apabila masyarakat tidak hadir dalam kegiatan gotong-royong sesuai jadwal dari desa, maka tiap rumah dikenakan denda sebesar Rp.5000. Keterlibatan masyarakat juga dilihat dari rapat LPJ BUMDes Desa Tanjungan tahun 2021. Rapat musyawarah ini dihadiri oleh Anggota BUMDes, Badan Pengurus Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam rapat ini masyarakat dibebaskan bertanya dan menyampaikan ide/saran. Aspirasi tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu,

guna dibuat untuk pengambilan keputusan. Hasil dari pemaparan rapat oleh BUMDes Desa Tanjungan, perlu adanya evaluasi dari kinerja pengelola BUMDes. Evaluasi tersebut dibagi menjadi 2 yakni evaluasi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan yang menyangkut tentang pengurus BUMDes. Kedua evaluasi tersebut sangat penting untuk proses keberlanjutan usaha di BUMDes di masa mendatang. Namun masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Desa Tanjungan sebab sistem manajemen BUMDes Desa Tanjungan yang masih terikat dengan Pemerintah Desa Tanjungan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Tanjungan menyebutkan bahwa, kelompok masyarakat yang memiliki keaktifan berpartisipasi yang relatif lebih tinggi adalah kelompok paruh baya atau sudah berkeluarga. Sedangkan kelompok pemuda memiliki partisipasi yang justru belum maksimal atau tergolong masih rendah. Hal ini terlihat pada kegiatan kerja bakti dan rapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan bahwa perwakilan masyarakat dari kelompok pemuda hanya sedikit bahkan terkadang tidak ada. Ketua BUMDes Desa Tanjungan Menyebutkan:

“Di Desa Tanjungan masih krisis pemuda, terkadang lulus dari SMA/SMK sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti bekerja di luar, melanjutkan pendidikan dll. Apabila ada kegiatan kita bingung mencari anak-anak muda, jadi anak-anak muda yang sudah punya kegiatan di luar tidak mau mengurus karang taruna. Akhirnya usia-usia yang sudah tua di tarik kembali untuk mengurus karang taruna, dan berpartisipasi di desa” (Wawancara Ketua BUMDes Desa Tanjungan)

Selanjutnya perwakilan dari anggota karang taruna juga menyebutkan bahwa partisipasi pemuda di Desa Tanjungan tergantung dari acara yang diselenggarakan. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota karang taruna tersebut menyatakan:

“Untuk partisipasi Kadang tergantung acara yang di selenggarakan contohnya seperti kirab yang acara besar banyak pemuda yang ikut, tapi untuk kegiatan lain seperti kerja bakti sendiri tidak terlalu ikut, kalau tentang komunitas POKDARWIS (kelompok sadar wisata) dan pengelola wisata di bawah BUMDes, tidak tergabung di dalamnya,

bahkan tidak mengetahui sama sekali dan baru tahu kalau ada komunitas dan BUMDes tersebut.” (Wawancara anggota karang taruna Desa Tanjungan)

Beberapa dari narasumber lainnya menyebutkan penyebab dari kurang aktifnya partisipasi pada kelompok pemuda disebabkan oleh, antara lain:

1. Kurang antusiasme terhadap kegiatan
2. Terlalu mementingkan diri sendiri
3. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing
4. Melanjutkan pendidikan

2. Prinsip Menjaga Lingkungan Hidup

Upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan kesadaran warga sekitar terkait pentingnya menjaga lingkungan (Cahyaningrum et al, 2020). Pada prinsip menjaga lingkungan hidup, partisipasi masyarakat sangat di perlukan untuk menjaga agar kawasan wisata tetap terjaga kebersihan lingkungannya. Seperti diketahui pada prinsip sebelumnya bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong-royong masyarakat adalah satu upaya untuk tetap mempertahankan kebersihan lingkungan. Tidak hanya itu, menjaga lingkungan hidup masyarakat juga harus memiliki kesadaran menanam pohon sejak dini guna bagi generasi berikutnya, tidak menebang pohon secara sembarangan, melakukan reboisasi, dan merawat pohon serta tanaman di lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara dengan anggota LPM Desa Tanjungan, mengatakan bahwa:

“Setiap 1 tahun sekali selalu ada gerakan penanaman pohon yang kita ajukan dari Perum Perhutani BKPH Kemlagi, Mojokerto, untuk ditanam di sekitar lokasi wisata. Pernah juga ada gerakan penanaman 1000 pohon waktu awal peresmian waduk dengan Gubernur Jawa Timur tahun 1983” (Wawancara Anggota LPM Desa Tanjungan)

Penanaman 1000 pohon tersebut sebagai simbol di resmikannya pembangunan waduk pada tahun 1983. Serta memiliki tujuan untuk menjaga Desa Tanjungan agar tetap asri di masa yang akan datang. Kegiatan gotong-royong ini meliputi, pembersihan sampah, dan pemangkasan pohon yang dirasa membahayakan bagi pengunjung. Seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Kegiatan Kerja Bakti di Sekitar Area Lokasi Wisata

Sumber: Instagram Waduk Tanjungan

Pada saat peneliti melakukan observasi di sekitar area wisata, terdapat beberapa peringatan larangan yang di pasang dengan harapan agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang tersebut, sebagai bentuk upaya dalam melestarikan lingkungan. Tidak hanya bagi manusia, namun juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Larangan tersebut berisikan peringatan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan demi kepentingan pribadi, dilarang keras membuang sampah di sekitar lingkungan tempat wisata dan area waduk, dan larangan untuk tidak membakar sampah secara sembarangan serta larangan menembak burung di sekitar lokasi wisata.



Gambar 4. Peraturan di Area Lokasi Wisata

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Merujuk pada papan peringatan diatas, pada kenyataannya hasil dari peneliti melakukan observasi menunjukkan, kebersihan area wisata hanya setengah dari area waduk. Lokasi yang jauh dari pintu loket masuk masih belum sepenuhnya dijangkau. Seperti, masih ada beberapa masyarakat dan pengunjung membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini disebabkan kurangnya pemberian tempat/bak sampah dan belum adanya pembaruan bagi tempat sampah yang dirasa sudah tidak layak digunakan atau rusak. Tempat/bak sampah yang disediakan berjumlah kurang lebih sekitar 11, namun belum tersebar secara merata di area lokasi wisata dan tidak adanya pengelompokan dari tempat sampah tersebut.



Gambar 5. Keadaan Tempat/bak Sampah di Area Lokasi Wisata

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Desa Tanjungan sendiri memiliki bank sampah, namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Anggota tim bank sampah adalah ibu-ibu PKK. Kegiatan mengelola sampah ini sempat beroperasi dalam beberapa bulan, akan tetapi tidak berlanjut akibat terkendala proses pemasaran. Selain itu, kurangnya pemberian edukasi pada anggota tim bank sampah pun menjadi faktor tertahannya proses pengelolaan sampah. Pengurus bank sampah masih kurang memahami dalam hal pemilahan dan pengelolaan sampah tersebut. Pada akhirnya sampah-sampah tersebut hanya di bakar dan dibuang. Kepala desa Tanjungan mengatakan:

“Kami memiliki bank sampah namun pengelolaannya tidak maksimal tim bank sampah dan ibu-ibu pkk masih belum memahami cara pengelolaannya, tetapi pengelolanya ada.” (Wawancara Kepala Desa Tanjungan)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan anggota LPM Desa Tanjungan juga mengatakan:

“Pengelolaan sampah masih kurang, pernah ada usulan disiapkan bak sampah namun belum terealisasi, dan juga tidak adanya lahan untuk pembuangan sampah” (Wawancara anggota LPM Desa Tanjungan)

Sejauh ini partisipasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sepenuhnya belum maksimal sebab kurangnya bekal kemampuan pada tim bank sampah terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah, tidak adanya pembaruan tempat sampah rusak, terakhir tidak adanya tempat pembuangan sampah (TPS).

3. Prinsip Kelestarian Budaya

Suatu budaya pasti mengalami perubahan akibat dari zaman yang semakin lama terus berkembang. Maka dari itu, manusia sebagai empunya bagian dari budaya wajib mempertahankan unsur kebudayaan, menjaga dan melestarikan dari hal-hal yang bisa menggantikan dari kemurnian budaya-budaya tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi perubahan pada unsur budaya tidak sampai secara

keseluruhan Widja dalam (Saepudin et al, 2018). Hal ini berarti budaya yang dimiliki di suatu daerah benar-benar tidak hilang atau berubah secara utuh.

Menurut Sari et al (2020) mengatakan bahwa pelestarian budaya lokal merupakan bentuk dari mempertahankan nilai tradisional dan nilai-nilai lainnya yang terkandung di dalam seni budaya dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi yang terus berubah. Maka dari itu diadakannya pelestarian budaya agar tetap dikenal juga untuk melakukan revitalisasi budaya atau penguatan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa kebudayaan di Desa Tanjung hingga kini sangat dijunjung tinggi. Masyarakat begitu antusias untuk tetap melestarikan budaya yang ada. Budaya yang paling utama dimiliki desa ini adalah Kirab budaya dan gamelan. Setiap setahun sekali terdapat budaya Kirab Sewu Takir Dewi Sekar Tanjung dilaksanakan tepat di bulan asyuro atau tahun baru hijriyah yang diadakan secara meriah. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya dapat dilihat sebelum dan selama kegiatan budaya berlangsung. Masyarakat banyak memberikan sumbangsih berupa pikiran, tenaga dan uang demi kesuksesan kegiatan budaya ini. Karena kirab budaya ini merupakan acara besar-besaran yang diikuti seluruh warga desa dan banyak pula anggaran digunakan, mengingat bahwa Dana Desa (DD) yang di anggaran untuk kegiatan ini tidak begitu banyak, hanya cukup digunakan untuk keperluan inti seperti penyewaan kostum dan keperluan penjagaan. Alhasil penambahan-penambahan lainnya adalah inisiatif dari masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap acara ini.

Kegiatan ini terbuka secara umum, pengunjung di luar Desa Tanjung diperbolehkan melihat selama acara berlangsung. Namun, pengunjung hanya bisa melihat prosesi, tidak ikut serta di dalam kegiatannya. Pemerintah Desa Tanjung memiliki tujuan dengan adanya kegiatan budaya ini dapat mempersatukan dan mempererat silaturahmi antar masyarakat dusun sekaligus untuk mempromosikan wisata.

“Budaya yang ada di sini itu kirab budaya sewu takir dewi sekar tanjung yang setiap tahun rutin dilaksanakan tepat pada bulan syuro dan melibatkan seluruh masyarakat desa tanjungan. Dengan adanya budaya ini yang tujuannya mempersatukan semua warga dusun. Tiap dusun biasanya membawa takir lalu dikumpulkan di desa sejumlah 1000 takir. Lalu ada pelatihan gamelan yang diikuti oleh anak-anak SD

dan ibu-ibu PKK” (Wawancara kepala desa tanjungan)



Gambar 6. Kirab Budaya Sewu Takir Dewi Sekar Tanjung

Sumber: Facebook Waduk Tanjungan

Kirab sewu takir dewi sekar tanjung ini diikuti oleh 3 dusun yang ada di Desa Tanjungan. Mengangkat tema yang dinamakan “SEWU TAKIR” setiap tahun, artinya sebagai perwujudan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa atas limpahan rezeki berupa hasil pertanian yaitu diberikan panen yang berlimpah, dan hutan jati di Desa Tanjungan. Urutan dari prosesi kirab dimulai dari pengambilan air dari tiga sumber masing-masing dusun, yaitu Dusun Sukomulyo, Dusun Jeruk, dan Dusun Tanjungan. Kemudian setelah terkumpul upacara penyerahan mata air dari tiga sumber yang berbeda kepada Kepala Desa untuk disatukan. Menurut kepercayaan hal ini melambangkan kesatuan kehidupan, penghidupan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa yang bertekad dalam memajukan Desa Tanjungan. Selanjutnya, kirab mengelilingi Desa Tanjungan. Dalam perjalanan tujuan menuju petilasan gunung kerdil untuk melakukan ritual, sebagai penghormatan kepada tokoh tertua yang disebut sebagai orang yang pertama kali babat atau membuka Desa Tanjungan. Kemudian, setelah dari petilasan gunung kerdil, kirab dilanjutkan ke tujuan terakhir yakni menuju arah Waduk Tanjungan, untuk melakukan prosesi larung sesaji dan makan bersama dalam sajian sewu takir, seperti pada gambar berikut;



Gambar 7. Prosesi Larung Sesaji

Sumber: Instagram Waduk Tanjungan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan melihat bahwa di area lokasi wisata terdapat bangunan berupa panggung budaya yang digunakan untuk menampilkan pertunjukan budaya kepada para pengunjung wisata. Selain itu budaya gamelan juga di tunjukkan untuk mengiringi pawai saat kirab berlangsung. Pemain dari gamelan ini di dominasi anak-anak SD. Pemerintah Desa memfasilitasi ruang pelatihan gamelan dan memanggil pelatih dari luar untuk membudayakan anak-anak SD dan juga ibu-ibu dalam mengasah kemampuannya bermain gamelan.



Gambar 8. Budaya Gamelan

Sumber: Instagram Waduk Tanjungan

4. Prinsip Pemerataan Pendapatan

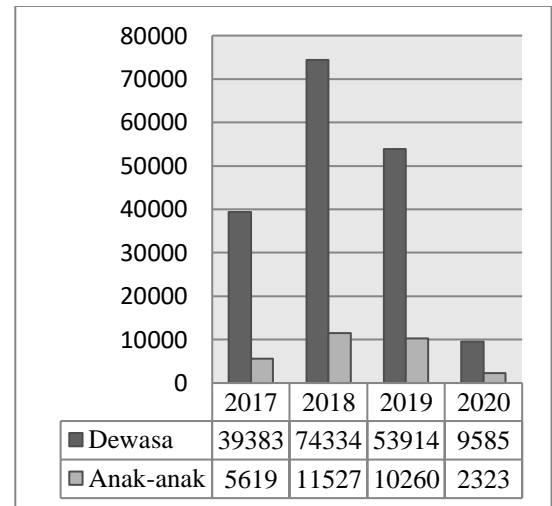
Kehadiran pengunjung atau wisatawan bisa membuka akses komunitas lokal guna mengembangkan peluang kerja dan peluang usaha. Tanpa adanya pengunjung wisata tidak akan membawa dampak ekonomi bagi pengelola wisata, hal ini dimaksudkan bahwa jika tidak ada kehadiran dari wisatawan maka prinsip dari CBT ini tidak akan berjalan (Nurhidayati & Fandeli, 2012). Pada prinsip ini dampak pengembangan wisata berkaitan dengan ekonomi pendapatan masyarakat sekitar dari kehadiran pengunjung wisata. Sumber penerimaan pada Desa Wisata Tanjungan berasal dari tiket masuk wisata, tiket parkir, warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Pemerintah desa dan BUMDes memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan salah satu wisata lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan pendapatan warga desa yang memiliki usaha kuliner di lokasi wisata. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanjungan, menyatakan:

“Dengan adanya wisata ini sangat membantu pendapatan warga, walaupun tidak tinggi tapi cukup untuk kehidupan perekonomian warga desa khususnya pekerja di sekitar pariwisata. Diutamakan

semua pekerja dari warga Desa Tanjungan, dengan memperlihatkan KTP”

(Wawancara Kepala Desa).

Keberadaan Desa Wisata Tanjungan sangat menarik perhatian pengunjung. Total jumlah pengunjung tiap tahun dapat dilihat dari data berikut;



Grafik 1. Jumlah Pengunjung Ekowisata Tanjungan Tahun 2017-2020

Sumber: BUMDes Desa Tanjungan

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung mengalami fluktuatif, pengunjung terbanyak berada di tahun 2018. Dampak lainnya yang dirasakan dengan adanya desa wisata ini bisa membantu usaha-usaha kecil seperti pedagang. Hal ini mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Jumlah warung yang ada sekitar kurang lebih 30. Warung-warung tersebut telah disediakan dari komunitas pengelola wisata dari anggaran Dana Desa (DD). Setiap penjual dihimbau untuk menyiapkan menu yang berbeda-beda tiap warung. Para penjual juga di kenakan uang kebersihan dan perawatan sebesar Rp. 10000 tiap Minggu.



Gambar 9. Usaha-Usaha Kecil di Desa Wisata Tanjungan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Segala sarana dan prasarana di area lokasi wisata seperti jalan, jembatan, warung-warung, kolam renang anak dan toilet dibangun oleh tenaga pekerja dari warga Desa Tanjungan sendiri. Adapun dari

partisipasi gotong-royong warga yang turut serta membantu pembangunan di area wisata. Pemerintah desa selalu mengutamakan warganya terlebih dahulu jika dirasa memenuhi dan cukup untuk tergabung di proyek pembangunan desa wisata. Setiap pekerja harus menyerahkan KTP sebagai bukti kepada tim pelaksana kegiatan. Jumlah pekerja dan upah dalam program pembangunan jalan tahun 2021, yang diperoleh tiap individu terdapat pada tabel berikut;

Tabel 4. Jumlah Pekerja Program Pembangunan Jalan Tahun 2021

Kategori	Jumlah	Upah Pekerja (Rp) per hari
Tukang	4	Rp. 120.0000
Pembantu	1	Rp. 100.000
PTT (Pekerja Tidak Tetap)	5	Rp. 90.000
Tim Pelaksana Kegiatan	5	Rp. 50.000

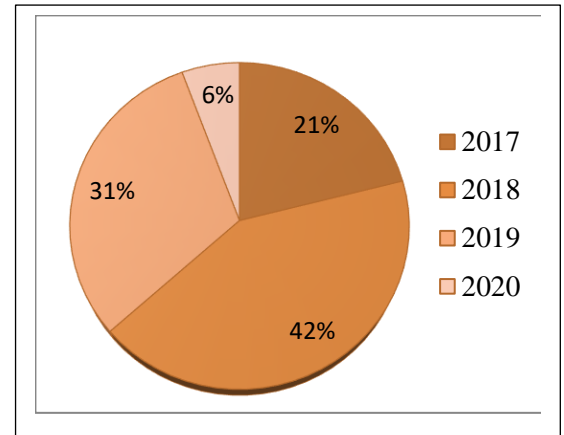
Sumber: LPM Desa Tanjungan

Upah yang tertera pada data di atas diberikan untuk para pekerja bangunan bersumber dari pendapatan wisata. Sebab hasil yang diperoleh dari wisata tergolong lumayan besar.

Akan tetapi dari semua hal tersebut, BUMDes Desa Tanjungan masih kekurangan sumber daya manusia sebagai pengurus utama BUMDes. Dimana saat ini dari segi manajemen komunitas pengelola wisata pun masih perlu banyak partisipasi dari masyarakat khususnya kalangan pemuda yang melek teknologi. Pengurus BUMDes membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa sosial, loyalitas tinggi, inovatif dan menguasai teknologi. Jika dilihat dari prinsip keikutsertaan anggota komunitas, menunjukan partisipasi pemuda yang lebih paham teknologi masih sangat rendah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bergabung dalam pengurus BUMDes dan komunitas pengelola wisata demi menjadikan Desa Wisata Tanjungan tetap berkembang. Keuntungannya masyarakat dapat menerima pendapatan hasil pembagian jika terlibat di dalam kepengurusan inti.

Berdasarkan observasi di lapangan partisipasi terlihat pada aktivitas wisata memang hanya sedikit sumber daya manusia. Dari struktur organisasi komunitas pengelola wisata masih perlu adanya penambahan anggota. Sebab aktivitas wisata dimulai pukul 06.00-20.00 WIB setiap harinya. Tentu hal ini

mengharuskan menerapkan sistem *rolling* bagi komunitas pengelola wisata, untuk meringankan pekerjaannya. Program desa wisata ini, memberikan sumbangsih dan penunjang yang paling tinggi bagi pendapatan asli desa. Seperti pada data berikut;



Grafik 2. Data Jumlah Pendapatan Ekowisata Tanjungan Tahun 2017-2020

Sumber: BUMDes Desa Tanjungan

Pada tahun 2017 pendapatan dari desa wisata diperoleh sebesar Rp. 199.332.500, lalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2018 sebesar Rp. 400.487.500. Kemudian di tahun berikutnya 2019 memperoleh sebesar Rp. 295. 220.000, dan disusul tahun 2020 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 53.732.500. Dalam indikator pemerataan pendapatan bahwa pemerintah Desa, lembaga, serta masyarakat Desa Tanjungan telah memanfaatkan potensi yang dimiliki desa ini dengan baik, sehingga hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi warga Desa Tanjungan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, melalui indikator *community based tourism*/CBT yang dikemukakan oleh Suansri dalam (Juardi et al, 2020), dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada kelompok pemuda masih sangat rendah atau kurang begitu maksimal. partisipasi yang cenderung mendominasi adalah kelompok paruh baya. Penyebab dari rendahnya partisipasi pada kelompok pemuda antara lain, kurang peduli terhadap kegiatan, terlalu mementingkan diri sendiri, tidak mengetahui program, komunitas, serta lembaga yang ada di desa, dan kurangnya pemahaman terkait pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Desa Tanjungan.

Pada prinsip keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata, peran masyarakat dan pemerintah desa begitu penting dan berkaitan erat dalam mengembangkan pariwisata melibatkan komunitas pengelola

wisata. Bentuk upaya dari pengembangan pariwisata yakni dengan diberikan pembekalan dan pelatihan terhadap komunitas pengelola wisata, pemilik warung-warung, perwakilan pemerintah desa dan karang taruna. Partisipasi masyarakat pada prinsip ini terlihat pada aktivitas pariwisata dan rapat laporan pertanggungjawaban.

Pada prinsip menjaga lingkungan hidup, pemerintah desa telah menjadwalkan kerja bakti atau gotong-royong kepada seluruh warga desa yang setiap bulan sekali dilaksanakan bergantian antar dusun. Di area lokasi pariwisata terdapat adanya papan peringatan sebagai bentuk upaya agar masyarakat dan pengunjung tetap menjaga kebersihan lingkungan wisata. Namun kenyataannya pada prinsip ini masih sepenuhnya belum maksimal. Terlihat dari tidak adanya lahan untuk tempat pembuangan sampah, kurangnya pemberian tempat/bak sampah dan pembaruan tempat sampah, kurangnya pemberian edukasi pada tim pengelola sampah, dan adanya bank sampah yang kurang begitu dimanfaatkan.

Pada prinsip pelestarian budaya, terlihat bahwa antusiasme masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan budaya begitu tinggi. Seperti pada perayaan kirab budaya sewu takir dewi sekar tanjung yang setiap tahun dilaksanakan. Dampak dari adanya desa wisata ini secara tidak langsung juga sekaligus memperkenalkan budaya Desa Tanjung kepada para pengunjung. Kegiatan ini mengajak seluruh warga Desa Tanjung untuk ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangsih serta mempererat silaturahmi antar dusun. Kemudian ada budaya gamelan yang digunakan untuk mengiringi selama acara kirab berlangsung.

Pada prinsip pemerataan pendapatan, Pemerintah Desa Tanjung lebih mengutamakan warganya sendiri di setiap kegiatan proyek pembangunan dan pemilik usaha-usaha kecil. Dengan adanya desa wisata ini sangat memberikan dampak ekonomi bagi para pekerja-pekerja tersebut. Namun dari struktur organisasi manajemen pengelola wisata perlu penambahan dari segi sumber daya manusia. Partisipasi kelompok pemuda memang sangat dibutuhkan untuk mengelola manajemen pengelola wisata sebab pada kelompok pemuda selain cenderung lebih paham akan teknologi juga sebagai generasi penerus yang nantinya akan mengembangkan guna pariwisata berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui pendekatan *community based tourism* di Desa Tanjung, peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Memberikan pendampingan dan pelatihan kembali guna meningkatkan rasa memiliki yang tinggi dan menumbuhkan jiwa berpartisipasi pada masyarakat terutama pada kelompok pemuda agar pemuda di desa tergerak untuk mengembangkan potensi, dan sadar akan potensi yang dimiliki desa.

2. Memisahkan sistem manajemen BUMDes Desa Tanjung dengan Pemerintah Desa Tanjung supaya lebih terorganisasi dengan baik dan memudahkan masyarakat memahami pengelolaan dari BUMDes Desa Tanjung.
3. Memberikan lahan untuk pembuangan sampah agar tidak dibuang secara sembarangan.
4. Memberikan edukasi dan menggerakkan kembali tim pengelola sampah, supaya bank sampah bisa dimanfaatkan dengan baik.
5. Memperbarui fasilitas yang dirasa sudah rusak, seperti penambahan tempat sampah dan mengganti tempat sampah yang baru.
6. Menjaga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan peran dan kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik, diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua
3. Segenap dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa
4. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA., selaku dosen pembimbing artikel
5. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si., selaku dosen penguji artikel
6. Ibu Suparlik, S.P., selaku Kepala Desa Tanjung beserta perangkatnya dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan izin penelitian serta informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerta, I. M. S. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bagus Sanjaya, R. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA KEMETUL, KABUPATEN SEMARANG. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>
- Cahyaningrum, D., Binar Aji Sukmana, A., & Adi Nugroho, R. (2020). The Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Konservasi di Kawasan Wisata Gedong Songo. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4153>
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism : Sebuah Review Literatur. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 50. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p50-56>

- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4).
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampara Kota). *e Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126.
- Juardi, J., Handani, D., & Sari, S. N. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Bukit Telago Dalam Perspektif Community Based Tourism. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 1(2). <https://doi.org/10.31334/jd.v1i2.843>
- Kabupaten Mojokerto. 2019. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Retrieved from <https://mojokertokab.go.id/fasilitas/pariwisata> diakses pada tanggal 28 November 2021
- Kemenpar. (2011). Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. *Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan*, 1–40. https://www.kemendikbud.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_all/2_PERMEN_TENTANG_PEDOMAN_PNPM_2013.pdf
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2019). *Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan*. www.kemenpar.go.id
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Pangestu, R. P. A. G. (2018). Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1209>
- Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1).
- Poncokusumo, K., Malang, K., Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2).
- Prapita, E. D. (2018). *Pengembangan Desa Wisata*. CV Graha Printama Selaras.
- Ruhimat, Asep, dkk. (2020). *Ensiklopedia Kearifan Lokal Pulau Jawa, Jawa Timur*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Saepudin, E., Damayani, N. A., & Rusmana, A. (2018). Model literasi budaya masyarakat Tatar Karang di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 14(1). <https://doi.org/10.22146/bip.33315>
- Sari, Y. K., Maria, A. S., & Hapsari, R. R. (2020). Kolaborasi Kreatif Kegiatan Pariwisata Dan Pelestarian Budaya Di Taman Budaya Yogyakarta (Tby). *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 3(1), 85–101. <https://doi.org/10.17509/jithor.v3i1.21853>
- Septiani, A. N. & Ma'ruf, M. F. (2019). Desa Wisata (Studi Di Desa Beji Jong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) Abstrak. *Publika*, 7(7), 1–8.
- Setyaningrum, I, Tjahjoanggoro, A.J., Soeherman, B. (2019). Pengembangan Ekowisata Desa Tanjung Berbasis Kemitraan Produktif. *JPM (Jurnal ...)*, 1(2), 145–159. <http://ejournal.amikompuwoko.ac.id/index.php/jpm/article/view/903>
- Wiyati, N. (2021). *Desa Sebagai Destinasi Wisata*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.